

Siaran Pers

KEGIATAN DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016

JAKARTA – Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kementerian PPN/Bappenas dalam Kegiatan Forum Diskusi Pemantauan Hasil dan Rencana Pembangunan memaparkan tiga kegiatan utama pada tahun 2015. *Pertama*, Koordinasi EKPD di 34 Provinsi yang bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pembangunan, dengan fokus analisis: (1) evaluasi tematik berupa sinkronisasi kegiatan pendukung di daerah untuk mewujudkan sasaran Nawa Cita yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019; (2) pengumpulan database sasaran pokok RPJMN 2015-2019.

“*Output*-nya adalah tersusunnya 34 Laporan Akhir EKPD di Provinsi yang mencakup fokus analisis evaluasi tematik di daerah terkait sasaran Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019 dan database sasaran pokok RPJMN 2015-2019, serta satu Laporan Nasional yang merupakan rangkuman hasil EKPD yang dibagi secara wilayah dan nasional,” jelas Yudo Dwinanda Priaadi, Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Kedua, Evaluasi Efektivitas Penggunaan Sosial Media Dalam Mendukung Proses Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan di Daerah. Adapun *output* yang diharapkan adalah tersusunnya laporan evaluasi terkait efektivitas penggunaan sosial media di enam lokasi (daerah), yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Balikpapan dan Kota Manado.

“Hasil evaluasi tematis ini memperlihatkan penggunaan sosial media dalam proses monitoring dan evaluasi (monev) di enam daerah sangat dipengaruhi oleh budaya komunikasi dan *political will* Pemda. Ke depan, trend penggunaan sosmed akan semakin meluas, sehingga dibutuhkan kreativitas Pemda untuk menangkap peluang penggunaan sosmed dan menjadikannya sebagai salah satu alat untuk monitoring, evaluasi, dan pengendalian (monevdal) daerah,” ujar Roni Dwi Susanto, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketiga, Kajian Pengembangan Kebijakan Evaluasi Ex-Ante Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun sebuah panduan yang dapat digunakan oleh perencana daerah dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan dokumen perencanaan. *Output*-nya adalah tersusunnya pedoman evaluasi ex-ante dapat menilai secara cepat dan mendeteksi kelengkapan dan kualitas dokumen RPJMD serta rekomendasi bagi penyempurnaan kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan.

“Pedoman evaluasi ex-ante mencakup dua hal. *Pertama*, evaluasi terhadap satu dokumen perencanaan untuk melihat relevansi program dengan arah kebijakan dan strategi, konsistensi antar bab dokumen RPJMD, konsistensi dan relevansi antar bab dokumen Renstra SKPD. *Kedua*, evaluasi antar dokumen perencanaan RPJMN, RPJPD, RPJMD, RKPDP, Renstra SKPD, Hasil Musrenbang, dan RTRW. Pedoman ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para perencana pembangunan untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dari sisi relevansi dan konsistensi,” jelas Yudo.

Untuk tahun 2016, Direktorat EKPD akan tetap melakukan kegiatan Koordinasi EKPD di 34 Provinsi, dengan tambahan dua kegiatan utama, yaitu (1) Evaluasi Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan dan Wilayah; (2) Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

“Evaluasi Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan kita fokuskan di Banten dan Jawa Barat, dan Evaluasi Ketimpangan Antar Wilayah di Jawa Timur. Selain itu, kita juga akan melakukan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa, yang bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional dengan lokus desa per kecamatan. Dan untuk mewujudkan perencanaan yang holistik tematik, integratif, dan spasial, kita juga melakukan Evaluasi Ex-Post, dengan fokus analisis *policy paper* dukungan daerah terhadap pencapaian salah satu prioritas nasional,” pungkas Yudo.

Jakarta, 11 Maret 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile
(021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id